

KETERKAITAN SPASIAL DAN KEBEBASAN MEMILIH DALAM KONTEKS PILKADA TANGSEL 2014

Thita Mazya¹

¹Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang

Email: thita.mazya@gmail.com

Abstrak

Sekalipun kebebasan memilih itu dijamin dalam undang-undang negara bahkan internasional, tetapi keputusan dalam memilih itu tak terlepas dari banyak faktor yang mempengaruhinya. Keterkaitan spasial, termasuk faktor kependudukan, juga bukan satu faktor yang berdiri sendiri dalam menjadi penentu keputusan seseorang. Dalam dinamika politik-pemilu, kebebasan memilih yang terdapat dalam slogan *luber*, pada kenyataannya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Kebebasan yang sejatinya merupakan prasyarat mutlak terwujudnya masyarakat yang demokratis bersisian dengan otoritas kelembagaan yang memberi hak kepada negara untuk menerapkan kekuasaan terhadap individu-individu dan membuat keputusan yang mengikat mereka.

Keyword : keterkaitan spasial, kebebasan memilih, pilkada, tangerang selatan

Latar Belakang

Sebagai negara yang menjalani konsep demokrasi, Indonesia telah mengalami gejolak pasang surut dalam politik pemerintahannya, hingga akhirnya reformasi mengantarkan masyarakat menuju era transparansi dan kebebasan dalam berdemokrasi. Kebebasan ini terjamin dalam pasal 28 UUD 45 dan tertuang juga dalam Deklarasi Universal Hak-hak Manusia di PBB tahun 1948. Kebebasan tidak hanya dari perbudakan dan mengeluarkan pendapat tetapi juga bebas untuk memilih serta berpartisipasi dalam pemilu. Kebebasan dalam pemilu di Indonesia juga tertuang dalam slogan *luber jurdil* (*langsung umum bebas rahasia jujur dan adil*).¹

Dalam melaksanakan pemilu yang *luber jurdil* banyak tantangan dan halangan yang harus dihadapi. Karena kebebasan dalam memilih itu tidak terlepas dari faktor-faktor yang menentukan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan.

Ada beberapa pandangan terkait perilaku pemilih, Adams, Merrill II dan Grofman (2005) misalnya, melihat ada tiga perspektif yang bisa digunakan ilmuwan politik untuk memahami perilaku pemilih, yakni: model *spatial*, model *behavioral*, (keputusan para pemilih tidak hanya dipengaruhi faktor kebijakan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor identifikasi partai politik, karakteristik sosio-demografis, persepsi pemilih terhadap kondisi ekonomi, evaluasi retrospektif pemilih terhadap kinerja incumbent) dan model *party competition* (perilaku pemilih dipengaruhi faktor loyalitas kepada partai politik, kemampuan pemilih menganalisis program-program yang ditawarkan kandidat, dan persepsi bahwa tidak ada kontestan pemilihan umum yang atraktif²).

Dalam konteks spasial misalnya, persepsi pemilih dipengaruhi oleh efek ruang atau lokasi (*space*) secara geografis dimana ia tinggal. Dan dari sisi geografis spasial, jumlah penduduk yang padat menentukan komposisi banyaknya jumlah kursi yang didapat. Jadi, semakin padat dan banyak jumlah penduduk, semakin besar peluang dan perwakilan yang didapat untuk

¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

² Alamsjah, Dinamika Politik Pilkada Di Era Otonomi Daerah, Jurnal TAMANPRAJA Vol. 1, Edisi 1, Juni 2011 (ISSN: 2087-9598)

daerah tersebut di parlemen. Tetapi, disatu sisi luasan spasial geografis (*district magnitude*), belum tentu berbanding lurus dengan jumlah penduduknya, seperti pulau Jawa misalnya, dibandingkan pulau Kalimantan, ia lebih kecil, tetapi jumlah penduduknya lebih padat ketimbang Kalimantan sehingga bisa jadi pulau Jawa memiliki kursi lebih banyak. District magnitude ini yang menentukan sebaran pemenang jumlah kursi untuk setiap lingkup daerah pemilihannya. Tidak hanya itu, lingkup daerah juga dipengaruhi oleh ikatan etnisitas yang dibangun dimasing-masing suku tersebut. Ketika suatu daerah sudah semakin padat, tingkat heterogenitasnya juga semakin tinggi dan peluang konfliknya pun semakin besar. Dan dalam strategi politik pemilu, konflik-konflik justru sengaja diciptakan untuk saling mengalihkan atensi oposan. Beberapa isu konflik yang digunakan biasanya persoalan spasial etnisitas dan politik uang.

Sekilas Tentang Konsep Kebebasan Non Dominasi

Konsep kebebasan non dominasi merupakan karya pemikiran Philip Pettit seorang filsuf kelahiran Irlandia yang menjadi guru besar di Monash University Australia. Pemikirannya dipengaruhi oleh Isaiah Berlin dan Quentin Skinner sehingga konsep kebebasannya dibuat untuk menjembatani konsep kebebasan mereka. Dalam kebebasan non dominasi, seseorang harus memiliki status setara dahulu agar dapat saling menjaga posisinya, karena jika tidak setara maka bisa dipastikan ada dominasi di dalamnya. Dalam konsep negara republikan, Pettit ingin menyampaikan gagasan kebebasan non dominasinya sebagai solusi terhadap dikotomi kebebasan individu disatu sisi dan otoritas negara yang disertai kebebasan oleh individu tersebut untuk mengaturnya. Sehingga ia menyebutnya sebagai interferensi atas kehendak pribadi.

'When you are not dominated, then, you enjoy the absence of interference by arbitrary powers, not just in the actual world, but in the range of possible worlds where contingencies of the kind mentioned have a different, less auspicious setting. Those who are attached to the ideal of non interference value the fact of having choice--- the fact of non interference---

whether the choice is dominated or not; those who embrace the ideal of non domination value the fact of having undominated choice, but not necessarily the fact of having choice as such. (Pettit, 1997:25)

And,

'Non domination is the position that someone enjoys when they live in the presence of other people and when by virtue of social design, none of those others dominates them. (Pettit, 1997:67).

Dalam bukunya yang berjudul '*Republicanism: A Theory of Freedom and Government*', Oxford University Press, Oxford, 1997, Pettit mengatakan, kebebasan individu itu mencakup kebebasan positif juga kebebasan negatif. Dalam arti, di satu sisi Individu memiliki otonomi untuk dapat menikmati kehidupannya tanpa terinterferensi oleh orang maupun kelompok lain dalam bentuk apapun apalagi sampai terdominasi. Di sisi lain, individu bebas untuk menjadi tuan bagi dirinya sendiri selama hukum menjadi landasan utama terselenggaranya kebebasan tersebut. Untuk itu Pettit menamakannya sebagai konsepsi kebebasan alternatif; non dominasi. Apa yang menjadi istimewa dalam gagasan Pettit dibanding pemikir lainnya adalah Pettit mencoba menempatkan non dominasi sebagai sebuah nilai moralitas. Jika moralitas tersebut menjadi bagian dari cara berfikir, berperilaku dan bertindak atau menjadi norma, dalam tubuh institusi akan menghasilkan kebijakan yang menempatkan warganya sebagai manusia yang berkualitas, defensif, dan memiliki pencitraan diri yang kuat terhadap sesamanya. Dengan demikian, non dominasi menjadi bagian norma sosial yang bisa menghilangkan keinginan interferensi apalagi mendominasi.³

Spasial geografi dan Jumlah Penduduk penentu Pilkada

Informasi spasial dan distribusi keruangan secara geografis sebetulnya sangat membantu dalam mengetahui partisipasi masyarakat terhadap politik. Dimana spasial geografi ini bisa menyajikan data spasial dan temporal dari hasil pemilihan umum disuatu wilayah serta perilaku partisipan dalam pemilu

³ Thita Moralitea Mazya, Non dominasi sebagai teori kebebasan pemerintahan: telaah kebebasan dalam

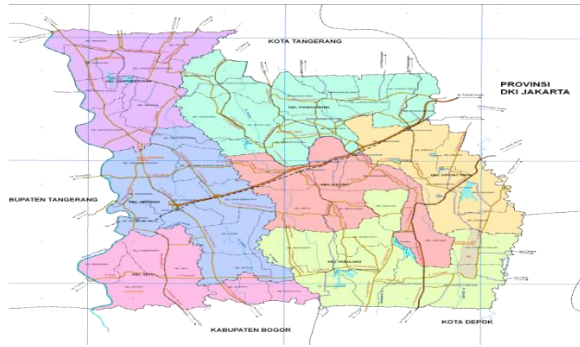
perspektif Philip Noel Pettit, Tesis: Universitas Indonesia Depok, 2006.

tersebut. Sehingga hasilnya bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah perolehan suara. Dalam istilah pemilu, spasial geografi ini disebut ‘*district magnitude*’ atau sebaran wilayah pemilihan. Ada tiga model district magnitude secara umum yakni; 1) berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, provinsi, nasional (seperti di Belanda, Israel, Filipina juga Indonesia untuk antar provinsi, kab/kota), 2) berdasarkan jumlah penduduk dalam batas toleransi plus-minus tertentu atau, 3) kombinasi keduanya.⁴ Dan Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 menggunakan model ketiga, yakni kombinasi keduanya. Adapun fungsi lingkup district magnitude ini adalah sebagai batas geografis penentu jumlah suara yang diperhitungkan untuk menentukan calon terpilih.

Khusus model kombinasi ini, jumlah penduduk bisa juga dijadikan kriteria utama dengan kabupaten atau kota yang penduduknya sama dengan jumlah penduduk untuk suatu distrik yang secara otomatis ditetapkan sebagai daerah pemilihan. Lingkup daerah pemilihan berdasarkan jumlah penduduk biasanya diwakili oleh satu kursi, sedangkan lingkup daerah pemilihan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan biasanya diwakili oleh lebih dari satu kursi. Oleh karena Indonesia menganut model kombinasi maka peluang perolehan kursi bisa lebih dari satu jika daerah dan penduduknya berjumlah besar.

Bagi kota Tangerang Selatan yang juga melaksanakan pilkada di tahun 2015, letak geografisnya yang strategis sebagai penyangga ibukota juga turut menjadi penyumbang kemenangan bagi calon incumben Airin-Davnie. Dimana secara spasial geografi kota ini terletak di bagian Timur Provinsi Banten, yaitu pada titik koordinat 106°38’-106°47’ Bujur Timur dan 06°13’30”-06°22’30” Lintang Selatan, memiliki Luas sebesar 147,19 Km² dan mempunyai 7 (tujuh) Kecamatan yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) Kelurahan⁵.

Peta Kota Tangserang Selatan



Kota Tangerang Selatan sendiri berbatas wilayah dengan komposisi Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta; Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Dengan kondisi topografi kemiringan tanah rata-rata 0–3%, sedangkan ketinggian wilayah antara 0–25 mdpl menjadikan kota ini berada didataran rendah dan relatif datar. Artinya, posisi spasial tersebut menempatkan kota Tangsel sebagai hiterland dengan tingkat keterlekatan masyarakat pada daerahnya cukup tinggi. Dari posisi district magnitude kota Tangsel terdapat tujuh kecamatan, dengan sebaran wilayah paling besar adalah Pondok Aren dengan luas 29,88 Km² atau 20,30% dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan, sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Setu dengan luas 14,80 Km² atau 10,06%.

Tabel.1.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Terhadap Luas Kota (%)
1	Serpong	24,04	16,33%
2	Serpong Utara	17,84	12,12%
3	Ciputat	18,38	12,49%
4	Ciputat Timur	15,43	10,48%
5	Pamulang	26,82	18,22%
6	Pondok Aren	29,88	20,30%

4

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F24199/Daerah%20Pemilihan.htm>

⁵ berdasarkan Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2012

7	Setu	14,80	10,06%
Kota Tangerang Selatan		147,19	100,00%

Sumber: RTRW Kota Tangerang Selatan

Begitu juga untuk jumlah penduduk, Kota Tangerang Selatan selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,72% pertahunnya. Walaupun secara absolut mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya mengalami kecenderungan penurunan. Pada tahun 2011, pertumbuhan penduduk mencapai 3,63%, kemudian turun pada level 3,36% pada tahun 2015. Secara absolut jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011

sebanyak 1.355.926 jiwa, hingga tahun 2015 mencapai angka 1.543.209 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut menyebabkan kepadatan penduduk semakin meningkat pula, pada tahun 2011 sebanyak 9.212 jiwa/km² menjadi 10.484 jiwa/km² pada tahun 2015.

Jumlah penduduk kota Tangsel, jika dilihat menurut jenis kelamin untuk tahun 2014, untuk penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah hampir setengah dari total penduduknya yakni 740.399 jiwa dari 1.492.999 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,65.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kota Tangerang Selatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Penduduk		Total	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Setu	39.814	38.067	77.881	101,43
2	Serpong	81.291	82.624	163.915	102,42
3	Pamulang	163.531	160.426	323.957	99,19
4	Ciputat	111.535	107.849	219.384	101,65
		752.600	740.399	1.492.999	101,65

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2015

Dengan jumlah penduduk dan sebaran distrik magnitude di tujuh kecamatan, diperoleh total kursi pemengangan sebanyak 50 kuota untuk para wakil rakyat periode 2014-2019 dengan hasil data yang ditetapkan KPU Tangsel, yakni; Golkar dengan perolehan 9 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 9 kursi, Gerindra 7 Kursi, Hanura 6 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 kursi, Nasdem 3 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 3 kursi, Demokrat 3 kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 kursi.

Dan berdasarkan data KPU seperti dikutip pukul 22.00 WIB Sabtu (12/12/2015), di Pilkada Tangerang Selatan total ada 920.582 suara di 2.245 TPS yang tersebar di 7 kecamatan yang diperebutkan tiga pasangan calon. Hasilnya, pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie memperoleh 305.298 Suara (59,62 persen). Pasangan Arsid-Elvier

Ariadiannie Soedarto Poetri memperoleh 164.648 suara (32,16% persen), dan terakhir pasangan Ikhsan Modjo-Li Claudia Chandra memperoleh 42.094 suara (8,22 persen). Dari total 920.582 pemilik suara, jumlah yang menggunakan hak pilih atau yang datang ke TPS hanya 533.807 orang. Sehingga partisipasi pemilih di Pilkada Tangsel sebesar 57,99 persen. Maka ada 386.775 suara atau 42.01 persen yang tak menggunakan suara, atau yang dikenal sebagai golongan putih (golput).⁶

1. Kebebasan memilih yang dipengaruhi keterlekatan spasial

Spatial dalam Cambridge Dictionary berarti spasial, space, terkait dengan ruang, posisi, area, tempat atau ukuran sesuatu.⁷ Spasial dari sisi ruang tempat tinggal berarti terkait letak geografis dan batas-batas wilayah yang didiaminya. Dan dari segala kegiatan pemilihan

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3094341/data-kpu-airin-menang-telak-di-pilkada-tangsel-golput-42-persen>

⁷ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spatial>

kepala daerah maupun pemilu jelas memperlihatkan bila kemenangan pemilihan kepala daerah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya jumlah penduduk tetapi juga oleh spasial, atau sebaran district magnitudenya. Model kombinasi ini digunakan mengingat sebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia, ada pulau Jawa yang padat tetapi secara spasial geografi sempit tetapi ada juga Kalimantan yang luas tetapi secara jumlah penduduk tidak sepadat di P.Jawa. Dan untuk kota Tangsel dengan luas 147,19 Km² dan terbagi dalam 7 distrik kecamatan diperoleh kuato kursi kemenangan untuk wakil rakyat sebanyak 50 kursi. Dan untuk kemenangan pemimpin daerahnya dari 7 distrik tersebut diperoleh suara terbanyak sebesar 305.298 Suara (59,62 persen) untuk pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie dari total 920.582 hak suara. Dan dari jumlah suara terbanyak tersebut Airin-Davnie memperoleh suara terbanyak diwilayah Setu sebesar 64,97% justru diwilayah yang secara spasial geografi memiliki luas paling kecil diantara luas 7 kecamatan lainnya.

Bagaimana spasial ini sangat terkait pada kemenangan pilkada, Pitriyandi (2017) pernah meneliti dan menurutnya, hasil penelitian dengan menggunakan metode Nilai Indeks Moran diperoleh hasil sebesar 0.226 dari satu wilayah spasial di Kecamatan Pondok Jagung, Serpong Utara dengan pola suara yang membentuk cluster. Dalam arti, suara pemilih Airin dan Benyamin pada satu kelurahan memiliki keterkaitan spasial dengan suara pemilih pada kelurahan yang lain yang menjadi tetangganya (*intersect neighborhood*). Namun demikian, keterkaitan spasial itu sendiri tak terlepas dari dimensi lain seperti budaya, sosial dan ekonomi yang turut mempengaruhinya.⁸ Keterkaitan spasial dalam proses pemilihan umum kepala daerah di Kota Tangerang Selatan tahun 2014 tersebut bila dilihat dari prosentasi jumlah penduduknya saat itu sebanyak 1.492.999 orang dengan komposisi kemenangan calon Airin-Davnie 52.3% suara.

Rata-rata perolehan suara Airin-Davnie pada Pilkada 2014

Districts	Perolehan Suara (%)
Serpong Utara	56.62
Serpong	55.09
Ciputat	61.06
Ciputat Timur	63.60
Pamulang	55.60
Pondok Aren	63.30
Setu	64.97

Sumber: www.kpu.go.id, 2015

Selain faktor spasial, perilaku pemilih juga menentukan proses pemilihan pemilu/kada dan Indonesia sebagai negara republik dengan konsep demokrasi yang dianutnya memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri; memilih atau berpartisipasi dalam pemilu. Dan dalam wacana kebebasan secara umum, terdapat dua konsepsi kebebasan yang dikemukakan oleh Isaiah Berlin, yakni kebebasan negatif dan kebebasan positif. (Berlin, 1958:7-19) Dalam konsep kebebasan positif Berlin, seseorang itu dikatakan bebas jika ia dapat menjadi tuan bagi dirinya sendiri (*self mastery*). Dalam arti, bebas dari sesuatu (*free from*) dan bukan bebas untuk sesuatu (*free for*) Gagasan kebebasan negatif Berlin didasarkan pada pertanyaan terhadap kebebasan dalam wilayah apa seseorang atau kelompok manusia harus dibiarkan bertindak atau berkehendak sebagaimana yang ia sendiri mampu lakukan tanpa campur tangan orang lain⁹. Jadi, kebebasan itu menurutnya adalah sejauh tidak ada orang atau kelompok orang yang ikut campur dalam apa yang dilakukan orang lain.

Kebebasan ini kemudian menjadi satu hal yang problematis ketika ia menjadi bentuk ketidakbebasan bagi orang lain. Dalam arti, kebebasan yang membatasi. Kita tidak bisa bebas memutar lagu sekeras-kerasnya karena pasti ada tetangga yang terganggu, atau sebaliknya. Untuk itulah akhirnya sebagian kebebasan tersebut diserahkan pada negara

⁸ Pitriyandi, *The Political Geography of Voters and Political Participation: Evidence from Local Election in Suburban Indonesia*, Doctoral Student of Regional & Rural Development Planning Sciences Bogor Agricultural University (IPB);Jurnal 2017.

⁹ Thita Moraltha Mazya, *Non dominasi sebagai teori kebebasan pemerintahan: telaah kebebasan dalam perspektif Philip Noel Pettit*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok 2006.

untuk mengaturnya. Dan kehendak bebas masyarakat yang diserahkan pada negara ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politis sehingga, kebebasan ini menggiring masyarakat pada pembicaraan seputar keanggotaan demokratik dan partisipasinya. Kondisi demokrasi seperti ini kental dimasa orde baru dahulu bahkan hingga kini. Salah satunya adalah pada saat berlangsungnya pemilihan para pemimpin kepala daerah.

Sekarang kondisi demokratik lebih modern, tetapi lebih cenderung partisipasinya menjadi cara untuk mencapai tujuan dan melindungi tujuan mereka sendiri. Istilah sekarang disebut dengan ‘demokrasi deliberatif’, yakni yang menurut F.Budi Hardiman, dalam teori demokrasi deliberatif itu menawarkan suatu pandangan bagaimana mengaktifkan individu dalam masyarakat sebagai warga negara untuk berkomunikasi, sehingga komunikasi yang terjadi pada level warga itu mempengaruhi pengambilan keputusan publik pada level sistem politik¹⁰. Pada demokrasi model ini, proses perolehan legitimasi secara diskursif yang menjadi fokusnya sehingga komunikasi tersebut dapat memperoleh konsensus yang disepakati bersama secara legitimate. Keputusan dalam proses ini dapat dikontrol melalui kedaulatan rakyat, dan jika rakyat sudah bisa mengkritisi, menurut Jurgen Habermas bargaining posisi rakyat sudah bisa disebut setara, karenanya dalam komunikasi yang setara, konsensus itu bisa tercapai dan terlegitimasi secara fair. Dalam hal ini, konteks spasial bisa juga berarti ruang publik masyarakat untuk berbicara dan mengeluarkan pendapatnya. Dimana kebebasan untuk itu dilindungi undang-undang.

Terkait perilaku pemilih ada beberapa teori yang bisa digunakan dalam hal ini antara lain; Lau dan Relawsk (2006: 3-46) menunjukkan lima model untuk memahami pemilih dalam pemilihan umum, yakni: model *rational choise*, model *confirmatory desicion making*, model *fast and frugal desicion making*,

dan model *semiautomatic intuitive desicion making*, dan model *oriented desicion making*.¹¹

Dari Thomassen (2005) menjelaskan keputusan pemilih itu bisa dikarenakan oleh variabel agama, kelas sosial, identifikasi partai, orientasi nilai dan ideologi, isu-isu politik, pertimbangan retrospektif, pemimpin politik, dan konteks kelembagaan politik. Ada juga yang menggunakan pertimbangan sosiologis seperti yang digunakan mazhab Colombia, pertimbangan psikologis pada mazhab Michigan dan pertimbangan rasional pada mazhab Virginia.¹²

Dan terkait ketiga mazhab tersebut dapat diilustrasikan ketika misalnya pada kesukaan terhadap sosok Jokowi yang ndeso, blusuk sana blusuk sini tanpa protokoler dan sederhana tetapi tegas memberantas narkoba, atau sudah jenuh dengan model kepemimpinan ala raja misalnya, menjadi faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih. Atau secara sosiologis dalam tekanan struktur pada ikatan sosial baik itu dalam partai, maupun dalam rumah tangga. Misal suami memilih calon A bisa saja karena struktur patriarki yang ada membuat istri harus ikut pilihan suami, dan suami adalah anggota partai tertentu sehingga seolah menjadi kewajiban bagi anggotanya untuk memilih sesuai partai yang menaunginya. Sehingga baik pilihan secara sosiologis maupun psikologis menempatkan individu sebagai objek yang tidak bebas.

Sedangkan pada pilihan rasional, menurut Anthony Downs dalam bukunya ‘*An Economic Democracy*’1957 mengatakan bahwa pada pemilih rasional seseorang akan menuruti kepentingan dirinya sendiri saja (*self interest axiom*).¹³ Dalam arti, ia akan memilih sesuatu yang akan menguntungkan dirinya saja, sesuatu yang bisa mengoptimalkan kesejahteraan materialnya. Pemilih yang rasional akan memilih partai yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Ia tidak terlalu tertarik kepada konsep ataupun orangnya, melainkan kepada keuntungan terbesar yang dapat ia

¹⁰ Hardiman, Budi F. 2009. *Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Hubermas*. Yogyakarta: Kanisius.

¹¹ Desyta Nugraheni, Analisis Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa, Laporan Studi Pustaka (KPM 403), SKPM, IPB,2016

¹²

<https://media.neliti.com/media/publications/1141-ID-perilaku-pemilih-pada-pemilihan-kepala-daerah-minahasa-utara-periode-2016-2021-s.pdf>

¹³ Anthony Downs, *An Economic Democracy*, Harper, Chicago Illinois pub. 1957 hal.49

peroleh apabila partai ini menduduki pemerintah dibandingkan dengan partai lain.

Rakyat kita saat ini bisa dibilang sebagai pemilih rasional, indikasinya terlihat dengan menjamurnya '*money politic*' atau politik uang dan banyak ditemukan kasus terkait hal tersebut bahkan seolah sudah menjadi budaya pemilu/kada kita karena terjadi hampir disemua daerah. Termasuk pilkada Tangsel, tak luput dari budaya money politik meski tak diungkap secara umum.¹⁴ Menurut pengamat politik Siti Zuhro, ketika kandidat yang bicara, maka yang bicara itu adalah uang, itu tidak bisa dinafikan.¹⁵ Ini bisa juga disebut komodikasi pilkada, semakin banyak uang yang diberikan semakin menentukan pilihan, meski rakyat sekarang sudah lebih cerdas, duitnya diterima memilihnya belum tentu dia. Akhirnya pemerintah berusaha mengatasi persoalan tersebut dengan menerapkan sistem pemilihan menjadi pilkada langsung yang dimaksudkan untuk memangkas politik uang, tetapi tetap saja tidak berpengaruh besar terhadap pola perilaku masyarakatnya. Malah sekarang rakyat bisa bargaining dengan para calonnya, dengan slogan jawaban rakyat yang menjadi viral '*wani piro*' begitu kata mereka.

Fenomena ini hendak menunjukkan bahwa, *rational choice* pun dipengaruhi oleh banyak faktor penyebabnya untuk sampai pada keputusan seseorang 'bebas' memilih. Disinilah Philip Pettit hendak menawarkan konsep kebebasan non dominasinya sebagai kebebasan alternatif yang bisa menjadi solusi bagi gagasan kebebasan yang ada. Dalam konsep non dominasinya, Pettit ingin seseorang itu bisa menikmati kebebasan otonominya dengan tanpa terinterferensi oleh seseorang atau kelompok dalam bentuk apapun. Yakni kebebasan yang dapat menghindari terjadinya tindakan kesewenangan atau interferensi. Situasi seperti tekanan dalam struktur partai misalnya, menunjukkan adanya posisi yang hirarkis dan adanya instruksi satu komando yang membuat kondisi seseorang menjadi tidak setara. Ini yang menjadi salah satu aspek rentan terhadap

munculnya praktik kesewenangan interferensi yaitu subordinasi dan dalam subordinasi selalu ada yang mendominasi. Disisi lain, Pettit juga ingin seseorang itu bebas menjadi tuan bagi dirinya sendiri, bebas tanpa tekanan siapapun asalkan mengikuti aturan hukum yang ada. Sebagai seorang republikan, Pettit berpendapat bahwa jika ada dominasi selalu ada ketidakbebasan¹⁶. Namun demikian setiap ketidakbebasan bukan berarti terjadi pembatasan. Sebab apabila pembatasan itu dilakukan oleh sistem hukum yang adil tidaklah menjadi masalah sejauh rezim tidak bertindak sewenang-wenang. Sebab pengertian tidak bebas di sini lebih diartikan sebagai korban dari kesewenang-wenangan. Pettit menyatakan bahwa tujuan kebebasan republikan adalah untuk menyatukan cara pandang tentang kebebasan sebagai manifestasi politik. Dengan demikian, jika negara dan warganya dapat menjaga kebebasan non dominasi di antara mereka, maka mereka tentu dapat menjaga diri mereka sendiri dari adanya dominasi. Jadi, Pettit ingin menjadikan kebebasan non dominasinya ini sebagai nilai moralitas yang termanifestasi dalam cara berfikir, berperilaku dan bertindak. Pettit ingin, nilai moralitas dari kebebasan non dominasinya ini menjadi bagian dari norma yang terinstitusionalisasi ke dalam sebuah kebijakan pemerintah republikan dan menempatkan warganya sebagai yang setara, berkualitas, mengerti haknya dan saling menghormati satu sama lain.

Namun sayangnya konsep kebebasan non dominasi Pettit ini belum bisa diterapkan dikondisi demokrasi Indonesia umumnya dan Kota Tangerang Selatan khususnya. Mengingat praktek *money politic*, isu etnisitas yang sering dijadikan konflik, tekanan-tekanan struktur partai dan segudang bentuk persoalan interferensi-dominasi kebebasan lainnya masih menjadi hidangan pesta demokrasi kita.

Kesimpulan

Bahwa seluruh individu sebetulnya dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas

¹⁴ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan adanya praktek money politic di puluhan daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah 2015 secara serentak. "Ada 27 daerah dengan 29 kasus yang ditemukan adanya praktek politik uang pada masa tenang selama tiga hari kemarin, demikian diulas harian online tempo

<https://pilkada.tempo.co/read/726342/pilkada-serentak-politik-uang-ditemukan-di-27-daerah>

¹⁵<https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180117191337-32-269707/politik-uang-diprediksi-marak-di-pilkada-2018>

¹⁶ Ibid Thita

kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan dan dicabut oleh negara, begitu kata John Locke (Scott Davidson, 1994:3). Bahwa sesungguhnya kebebasan itu dijamin haknya oleh konstitusi tetapi keputusan untuk bebas memilihnya itu yang dipengaruhi banyak faktor dan itu tercermin dalam perilaku para pemilih ketika dihadapkan pada pemilihan kepala daerah. Bahwa dalam kebebasan itu ada ketidakbebasan yang menyelimuti.

Oleh karenanya agar kebebasan satu sama lain bisa saling terjaga, maka sebagian kebebasan itu diserahkan pada negara untuk mengaturnya. Dan negara melakukan pemilihan pemimpin-pemimpin diantara mereka untuk mengurusnya, kebebasanpun diberikan pada rakyat sebagai wujud demokrasi untuk menentukan siapa pilihan pemimpin mereka. Penentuan pilihan sekalipun diberikan kebebasan seluasnya bagi setiap individu namun tak terlepas faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Dalam pilkada sendiri keputusan memilih seringkali dipengaruhi oleh politik uang, selain faktor kepemimpinan dan hal lain yang dilihatnya.

Sementara spasial geografis juga turut dianggap menentukan kemenangan seseorang dalam pilkada, walau tetap tak berdiri sendiri. Karena dalam spasial itu juga ada faktor etnisitas, sosial dan ekonomi yang juga turut mempengaruhi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kebebasan itu tidak ada. Dalam kebebasan selalu dibayangi ketidakbebasan orang lain didalamnya. Dan dalam kebebasan itu selalu ada interferensi faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Faktor spasial, etnisitas, politik, ekonomi, sosial, agama dan kepemimpinan dan pendidikan seseorang merupakan sebab terjadi dan berubahnya seseorang untuk memutuskan pilihannya. Dan kebebasan non dominasi Pettit sepertinya belum bisa diterapkan dalam iklim demokrasi republikan di Indonesia mengingat konstitusi dan kebijakan-kebijakan mayoritas yang menjadi acuan program negara, seringkali mengandung kepentingan penguasaan yang tidak lagi terfokus pada negara secara struktural, namun para pemilik modal. Bahkan negara sendiri terkadang tidak mampu melawan kuatnya serangan globalisasi untuk menguatkan

dirinya sebagai lembaga yang melayani rakyatnya.

Referensi;

- Anthony Downs, *An Economic Democracy*, Harper, Chicago Illinois pub. 1957 hal.49
- Desyta Nugraheni, *Analisis Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa, Laporan Studi Pustaka (KPM 403)*, SKPM, IPB,2016
- Hardiman, Budi F. *Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius. 2009
- <https://media.neliti.com/media/publications/1141-ID-perilaku-pemilih-pada-pemilihan-kepala-daerah-minahasa-utara-periode-2016-2021-s.pdf>
- <https://pilkada.tempo.co/read/726342/pilkada-serentak-politik-uang-ditemukan-di-27-daerah>
- <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180117191337-32-269707/politik-uang-diprediksi-marak-di-pilkada-2018>
- Liddle, R. William., & Mujani, Saiful., 2007. *Leadership, Party and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia, dalam Comparative Political Studies*, Vol. 40, No. 7, hal. 832-857
- Pitri Yandi, *The Political Geography of Voters and Political Participation: Evidence from Local Election in Suburban Indonesia*, jurnal IPB 2017
- Siregar, H.M., Sitepu, H.R., dan Ariswoyo, S. 2013. *Analisis Faktor Penyebab Kepadatan Penduduk Menurut Persepsi Masyarakat Di Kotamadya Sibolga*. Saintia Matematika. Vol. 1 (4) hlm. 349-358.
- Thita Moralita Mazya, *Non dominasi sebagai teori kebebasan pemerintahan: telaah kebebasan dalam perspektif Philip Noel Pettit*, Tesis UI, 2006.